



PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI JAWA TIMUR

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. PETRUS R. GOLOSE
Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 07 Maret 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

Pihak Pertama,
**KEPALA BNN PROVINSI
JAWA TIMUR**


Dr. PETRUS R. GOLOSE


Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO

Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	
12. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.15.921.105.000
13. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.438.648.000
14. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.579.066.000
15. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.21.989.913.000
16. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.419.660.000

Bogor, 07 Maret 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**



Dr. PETRUS R. GOLOSE

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN PROVINSI
JAWA TIMUR**



Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	17 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	17 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	17 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	2 Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2.75 Indeks
6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	94 Orang
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	10 Lembaga
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	19 Unit
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3.40 Indeks

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Meningkatnya pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan
12	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	25 Berkas Perkara
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
14	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks
15	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara
16	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
17	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	17 Kabupaten/Kota
18	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Indeks
19	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	17 Kabupaten/Kota

- | | |
|--|------------------|
| 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Rp.1.486.400.000 |
| 2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi | Rp.2.264.000.000 |
| 3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat | Rp.3.932.425.000 |
| 4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif | Rp.298.700.000 |
| 5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah | Rp.409.199.000 |
| 6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | Rp.2.036.095.000 |
| 7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkotika | Rp.261.727.000 |
| 8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi | Rp.150.000.000 |
| 9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika | Rp.1.400.000.000 |
| 10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti | Rp.1.184.975.000 |
| 11. Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian | Rp.210.000.000 |